

Judul : Plus minus penutupan prodi yang tak sesuai dunia kerja
Tanggal : Sabtu, 02 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Plus Minus Penutupan Prodi Yang Tak Sesuai Dunia Kerja

Wacana penutupan program studi (prodi) yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja menimbulkan pro dan kontra. Komisi X DPR, yang membidangi urusan pendidikan, angkat bicara.

Rencana penutupan prodi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23 April 2026). Badri mengatakan, rencana ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia pun meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk menyeleksi prodi mana saja

yang perlu ditutup.

"Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansi," kata Badri, seperti dalam tayangan video di YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Mendiknasiteknik Brian Yulianto kemudian meluruskan wacana ini. Dia menegaskan, prodi di perguruan tinggi akan dikembangkan sesuai kebutuhan masa depan, bukan ditutup.

"Alih-alih menutup, kita justru mengembangkan. Dikembangkan, ya, bukan ditutup," tegas Brian,

di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Brian lalu mencontohkan, di bidang teknik elektro saat ini memerlukan integrasi teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT). "Dalam arti, program studi kita dorong untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan yang diajarkan. Misalnya, jurusan elektro zaman dulu dengan sekarang berbeda. Dulu belum ada IoT, sekarang sudah ada," ujarnya.

Meski sudah diklarifikasi, wacana ini terlanjur ramai diperbincangkan. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudien berpandangan, apabila penyesuaian atau penutupan program studi tidak terhindarkan, harus disertai masa

transisi yang adil.

"Juga harus ada jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan dosen, termasuk skema keberlanjutan studi yang berkualitas," ujar Hetifah, kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (30/4/2026).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penghapusan program studi sebaiknya tidak berorientasi pada penutupan massal, melainkan transformasi. Karena itu, perlu ada kajian dan evaluasi terhadap setiap program studi.

"Program studi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi," tambah Hetifah.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri

Faqih menilai, penutupan prodi untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Pasalnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang tetap terserap di dunia industri.

"Masalah pokok pendidikan tinggi kita bukan semata-mata, karena terlalu banyak jurusan yang salah arah, tetapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar," kata politisi PKS ini, Kamis (30/4/2026).

Untuk mengetahui pandangan Hetifah Sjaifudien dan Abdul Fikri Faqih mengenai wacana penghapusan program studi yang tidak sesuai kebutuhan dunia kerja, berikut wawancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIEN, Ketua Komisi X DPR Fraksi Partai Golkar

Bukan Ditutup Massal, Tapi Perlu Revitalisasi



Kami akan memastikan bahwa setiap langkah reformasi pendidikan tinggi berjalan secara terukur, adil, dan berorientasi pada penguatan daya saing bangsa tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan.

Apa pandangan Anda terkait wacana penghapusan program studi di perguruan tinggi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini?

Pertama, kami memahami urgensi peningkatan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan arah pembangunan nasional. Namun, perlu ditegaskan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar penyedia tenaga kerja. Perguruan tinggi memiliki mandat lebih luas, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, merawat kebudayaan, serta membentuk daya kritis dan karakter bangsa.

Bagaimana agar kampus dapat menjaga mandat tersebut sekaligus berkembang sesuai kebutuhan dunia kerja?

Kami memandang bahwa pendekatan penataan program studi sebaiknya tidak berorientasi pada penutupan massal, melainkan trans-

formasi. Program studi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi.

Konkretnya?
Melalui pembaruan kurikulum, penguatan pendididkan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan lokal.

Apakah perlu ada indikator penilaian suatu program studi dianggap tidak dibutuhkan lagi?

Indikator "tidak produktif" harus ditetapkan secara hati-hati dan berbasis data komprehensif. Penilaian tidak dapat semata-mata didasarkan pada jumlah peminat atau serapan kerja jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dasar dan kebutuhan jangka panjang bangsa.

Apa dampak dari wacana ini?
Kami mengingatkan bahwa orien-

tasi efisiensi yang berlebihan berpotensi menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan fungsi strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban. Kebijakan pendidikan tinggi harus menjaga keseimbangan antara relevansi ekonomi dan kedalaman akademik.

Apa saran Anda kepada Pemerintah jika wacana ini ingin dilakukannya?

Proses evaluasi program studi harus dilakukan secara transparan, berkala, dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi, agar menghasilkan kebijakan yang kredibel dan akuntabel. Jika penyesuaian atau penutupan program studi tidak terhindarkan, maka harus disertai masa transisi yang adil serta jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan dosen, termasuk skema keberlanjutan studi yang berkualitas. ■ NNM

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Kebijakan Ini Jalan Pintas Yang Berisiko



Pemerintah sebaiknya fokus pada keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan di daerah, dan perbaikan kualitas kurikulum sebelum mengambil keputusan drastis.

Apa tanggapan Anda terhadap rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) yang ingin menutup sejumlah program studi di perguruan tinggi?

Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko. Akar persoalan pengangguran terdidaik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional.

Apakah prodi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja?

Manfaat sebuah jurusan kuliah tidak bisa diukur secara sempit dari kebutuhan industri semata. Bahkan, kegagalan serapan kerja tidak boleh serta-merta dibebankan sebagai kesalahan kampus. Kami mendesak Pemerintah untuk kembali berpatokan pada instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) I berbasis tracer study. Alih-alih menutup jurusan,

Pemerintah seharusnya membedah data akurat mengenai persentase lulusan yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, serta yang berhasil berwirausaha.

Menurut Anda, berapa besar serapan lulusan perguruan tinggi di dunia industri?
Berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKN) yang disorot ke Kementerian, serapan lulusan di sejumlah perguruan tinggi sebenarnya cukup tinggi. Laporan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2023 mencatat capaian IKU I sebesar 85,25 persen, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebesar 62,96 persen. Rata-rata serapan lulusan dari kampus yang terdapat berada di rentang 60 hingga 80 persen. Di sisi lain, anemali justru terlihat pada data makro ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Bisa dijelaskan?
Pada 2024, jumlah sarjana yang menganggur mencapai 842.378 orang, dan rasio key-ansibasi nasional masih stagnan di angka 3,5 persen. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan keterampilan lapangan kerja bermutu yang belum mampu disosialisasikan negara.

Bagaimana dengan kabar lulusan pendidikan atau guru yang dinilai terlalu banyak?
Kami mempertanyakan validitas angka tersebut. Data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat sekolah negeri masih kekurangan sekitar 374 ribu guru. Klaim 490 ribu lulusan berbanding 20 ribu kebutuhan akan menyedihkan jika tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru di berbagai daerah berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan. ■ NNM